



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

<i>PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA</i>	
Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer	121-138
PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA	
Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono	139-157
KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT	
Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam	158-171
<i>MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS</i>	
Hatib Abdul Kadir	172-184
KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA	
Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser	185-193
KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS	
Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita	194-204
MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT	
Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae	205-218
RINGKASAN DISERTASI	
<i>THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE</i>	
Bondan Widayatmoko	219-228
TINJAUAN BUKU	
MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT	
Ayu Nova Lissandhi	229-235
TINJAUAN BUKU	
DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN	
Eristya P. Irwanto	236-242



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DAFTAR ISI

*PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT
PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA*

Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer 121-138

PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN
KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA

Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono 139-157

KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT

Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam 158-171

MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS

Hatib Abdul Kadir 172-184

KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI
KHUSUS PAPUA

Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser 185-193

KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING:
ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita 194-204

MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT
DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae 205-218

RINGKASAN DISERTASI

*THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION (ISPO):
OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE*

Bondan Widiatmoko 219-228

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Ayu Nova Lissandhi 229-235

TINJAUAN BUKU

DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN DAN PANGAN

Eristya P. Irwanto 236-242



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC: 330.9**Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer*****PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: SUATU USULAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BAGI PAPUA BARAT, INDONESIA*****ABSTRAK**

Papua Barat adalah bagian timur Indonesia dengan sejarah panjang tata kelola dan skema pembangunan di bawah Belanda dan pemerintah Indonesia. Gagasan tentang keterbelahan dan keterlambatan jelas dalam pengembangan dan kebijakan yang diberikan oleh Belanda dan pemerintah Indonesia. Keadaan keterbelahan adalah preferensi orang Papua Barat untuk menjadi Papua Barat yang merdeka, dan atau orang Melanesia yang memuncak pada era Belanda atau menjadi bagian integral Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasan keterlambatan negara terkait dengan penerapan model dan kebijakan pembangunan dengan kesan tergesa-gesa yaitu otonomi khusus dan pemekaran di bawah Indonesia dan percepatan model dekolonisasi pembangunan di bawah Belanda. Maka penting untuk merumuskan model alternatif pembangunan dan paradigma yang disebut Push and Pull Driven Development untuk mengembangkan Papua Barat dengan lebih baik.

Kata kunci: paradigma push and pull driven development, Papua Barat

DDC: 307.7**Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono****PEMBANGUNAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP MASYARAKAT KEPULAUAN KECIL TERLUAR DI PAPUA, INDONESIA****ABSTRAK**

Selama empat dekade terakhir, pengembangan pulau-pulau terluar sejak Orde Baru mengalami kegagalan. Tulisan ini membahas kondisi pembangunan di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia Timur saat ini. Tulisan ini memperlihatkan kondisi terbatasnya akses terhadap pembangunan, yang kemudian membentuk strategi bertahan hidup bagi penduduk yang berada di beberapa pulau kecil terluar di Indonesia, yaitu Pulau Liki, Pulau Befondi, Pulau Fani, dan Pulau Brass-fanildo, yang semuanya masuk wilayah Papua. Dengan mempertimbangkan konsep yang diusulkan oleh Harry Jones, pembangunan seharusnya dapat mempertimbangkan tiga unsur dalam kesetaraan yaitu (1) peluang yang sama untuk hidup, (2) perhatian yang sama pada kebutuhan masyarakat, dan (3) meritokrasi. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator Indeks Desa Membangun, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tiga unsur kesetaraan pembangunan belum terasa di wilayah Indonesia Timur dan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan.

Kata kunci: indeks desa membangun, pembangunan dan strategi bertahan hidup, masyarakat pulau kecil terluar, kesetaraan dalam pembangunan, Indonesia Timur

DDC: 307.2

Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

KEPUTUSAN MIGRASI PEKERJA MUDA KE KOTA SORONG, PAPUA BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan migrasi pekerja muda ke Kota Sorong. Secara umum, penelitian ini akan membahas proses pengambilan keputusan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi migran, khususnya yang berpendidikan tinggi, bermigrasi ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Para migran berpendidikan tinggi tersebut kemungkinan memiliki berbagai pertimbangan ketika memilih Kota Sorong sebagai daerah tujuan migrasi mereka. Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dari wawancara dan didukung oleh kajian pustaka. Panduan disusun untuk memfasilitasi wawancara dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku migrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya memahami migrasi tidak sekedar sebagai suatu proses linear hanya untuk kepentingan ekonomi, namun faktor-faktor non-ekonomi juga berpengaruh dalam pembuatan keputusan migrasi.

Kata kunci: migrasi internal, tenaga kerja migran, proses pengambilan keputusan

DDC: 307.2

Hatib Abdul Kadir

MIGRAN SEBAGAI ASPEK PENTING YANG MENGANCAM ORANG LOKAL PAPUA

ABSTRAK

Riset ini mengeksplor migrasi internal orang Indonesia ke Papua. Migrasi internal tersebut dalam dua bentuk. Pertama migrasi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui transmigrasi, dan kedua migrasi sukarela dengan keinginan dari migran itu sendiri. Implikasi dari migrasi secara massif dan berkelanjutan ini adalah perubahan demografi secara signifikan di Papua. Orang lokal Papua menjadi minoritas baik secara jumlah dan akses mereka di ekonomi. Riset ini dilakukan di Sorong Raya, meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Dua wilayah ini secara signifikan menunjukkan dominasi migrasi di bidang ekonomi dan meminggirkan orang lokal Papua. Riset ini juga melihat response orang Papua terhadap dominasi migran tersebut.

Kata kunci: migrasi, dominasi, ancaman, orang lokal Papua

DDC: 323.1

Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser

KONTROVERSI REALISASI KURSI AFIRMASI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA

ABSTRAK

Munculnya muatan afirmasi dalam UU Otsus Papua merupakan suatu perjuangan panjang yang salah satunya dilatar-belakangi oleh rendahnya perwakilan politik dalam rangka kepentingan Orang Asli Papua (OAP). Kondisi ini pun, mendapat perhatian tim asistensi perancang UU Otsus Papua, yang kemudian munculnya pokok pikiran kuota afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bagi orang asli Papua. Dalam realisasinya, kuota tambahan anggota DPRP tersebut menemui jalan panjang dan kontroversi antara pihak pemerintah, kelompok masyarakat, dan elite politik. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui latar belakang munculnya kuota tambahan afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua; dan -2) untuk mengetahui dinamika kontroversi isu kuota tambahan afirmasi $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP bagi orang asli Papua pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam (in-depth interview) kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1) latar belakang munculnya kuota tambahan anggota DPRP, merupakan suatu kebijakan afirmasi dalam meningkatkan partisipasi politik orang asli Papua. Harapan dari kebijakan afirmasi ini sebagai suatu bagian penyelesaian kesenjangan dalam rekrutmen politik orang asli Papua, terutama yang terjadi di bawah rezim Orde Baru; dan -2) Penafsiran berbeda tentang muatan UU Otsus Papua, khususnya kuota kursi afirmasi baik pemerintah pusat-daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat adalah faktor sulitnya kuota kursi afirmasi ini direalisasikan.

Kata Kunci: otonomi khusus, afirmasi, legislatif

DDC: 302.2

Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

KRISIS PAPUA DALAM PERNYATAAN PEJABAT NEGARA DI MEDIA DARING: ANALISIS TEKSTUAL KONSTRUKSI WACANA KRITIS

ABSTRAK

Beberapa waktu ini, Indonesia sedang mengalami ancaman disintegrasi bangsa di Papua yang diawali insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, dan bentrok mahasiswa Papua dengan warga di Malang, merembet menjadi kerusuhan yang terjadi di kota-kota besar Papua. Sudah barang tentu gejolak nasional semacam ini akan menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, khususnya pemerintah. Penelitian ini menganalisis pernyataan-pernyataan pejabat negara di Indonesia yang berkaitan dengan krisis di Papua yang diberitakan media online. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yang pertama dimensi teks, kedua dimensi kognisi sosial dan yang ketiga dimensi konteks/praktik sosial, hasilnya media online Indonesia hanya memiliki perbedaan di level skematik yaitu penekanan poin penting dalam isi berita.

Kata kunci: krisis Papua, media online, pejabat negara

DDC: 398.2

Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

MEMITOSKAN MITOS: KONSEP LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK

Saling klaim kepemilikan atas tanah oleh sejumlah suku menjadi fenomena yang terus terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Tahun 2013 hingga tahun 2019 misalnya, terjadi 32 aksi pemalangan fasilitas publik milik pemerintah daerah dan swasta yang dibangun diatas tanah yang diklaim oleh sejumlah marga dan suku sebagai pemilik tanah yang sah. Masing-masing klen/marga dan suku mengklaim sebagai pemilik yang sah. Legalitas kepemilikan tanah oleh sejumlah suku dan klen/marga, dilakukan dengan mengkonstruksi mitos. Tulisan ini berbasis data fenomena saling klaim tiga suku tentang hak atas tanah di kawasan Bandara Udara Rendani Manokwari. Ketiga suku tersebut adalah suku Arfak, Doreri dan Mansim Mansim Borai. Untuk menguatkan klaim kepemilikan tanah, masing-masing memunculkan mitosnya sendiri. Namun, karena tidak ada kata sepakat, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas penggunaan tanah, mitos baru dimunculkan, yakni hak atas tanah adat yang digunakan untuk Bandara Udara Rendani Manokwari bukan milik salah satu suku, melainkan milik ketiga suku: Arfak, Doreri, dan Mansim Borai. Hal itu berarti mitos yang pernah ada dimitoskan lagi sehingga menghasilkan mitos baru. Mitos di produksi untuk menambah fakta tentang legalitas kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh sejumlah klen/marga dan suku.

Kata kunci: klaim kepemilikan tanah, memitoskan mitos, legalitas kepemilikan tanah, tanah adat Manokwari

Bondan Widyatmoko

RINGKASAN DISERTASI

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (ISPO): PELUANG INKLUSI BAGI PETANI SAWIT SWADAYA DI PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Disertasi ini meneliti mengenai kesempatan petani kelapa sawit untuk terinklusi ke dalam rantai produksi kelapa sawit yang tercipta melalui pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat mendorong formalisasi lahan sawit petani swadaya melalui proses *enclave*. Selain itu, ISPO juga mendorong upaya pencegahan konflik melalui penataan dan penggunaan lahan dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan bukti legal kepemilikan (SHM) dan bukti pengelolaan kebun (STDB). Hal ini mendorong proses inklusi petani sawit swadaya dengan semakin terbukanya akses permodalan, informasi serta terbangunnya sistem keterlacakan produksi sawit di Indonesia. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan survey rumah tangga petani, wawancara, pengamatan terlibat serta studi pustaka sebagai metode pengumpulan data.

Kata Kunci: implementasi, minyak sawit, berkelanjutan, petani sawit swadaya

Ayu Nova Lissandhi

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Judul Buku: *Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place*.

Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

Eristya P. Irwanto

TINJAUAN BUKU

**DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN
DAN PANGAN**

Judul Buku: *The Political Economy of Agricultural and Food Policies*.

Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.



MASYARAKAT INDONESIA

MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 45

NOMOR 2, DESEMBER 2019

DDC: 330.9**Marlon Arthur Huwae dan Jaap Timmer****PUSH AND PULL DRIVEN DEVELOPMENT: A PROPOSED DEVELOPMENT PARADIGM FOR WEST PAPUA, INDONESIA***ABSTRACT*

West Papua is located in the eastern part of Indonesia with a long story of governance and development schemes under the Dutch and Indonesian governments. The notions of state segregation and tardiness were stated obviously in the development and regulations given by the Dutch and Indonesian government. The segregated circumstance was the Papuans' preferences in order to be an independent West Papua and or the high number of Melanesians in the Dutch era or becomes an integral part of the Republic of Indonesia. Furthermore, the notions of state tardiness in regard to the implementation of development model and policy are related to special autonomy and the creation of new regions under the Indonesian government and the acceleration of the decolonized development model under the Dutch government. It is, therefore, important to formulate an alternative development model and paradigm which is called Push and Pull Driven Development to develop a better West Papua.

Keywords: *paradigm, push and pull driven development, West Papua*

DDC: 307.7**Irin Oktafiani, I Wayan Suyadnya, dan Triyono****DEVELOPMENT AND ADAPTATION STRATEGY FOR OUTERMOST SMALL ISLAND COMMUNITY IN PAPUA, INDONESIA***ABSTRACT*

Over the last four decades, the development of outer islands since New Order has grown failure. This paper explains the actual condition of some outer islands in East Indonesia which made an adaptation strategy for the peoples regardless of some limited access towards development. By considering the concept proposed by Harry Jones, the development itself should consider three elements of equity to achieve which are, (1) equal life chances, (2) equal concern for people's needs, and (3) meritocracy. Data were collected by observation and in-depth interviews during Ekspedisi Nusa Manggala 2018. The study was conducted in Liki, Befondo, Fani and Brass-Fanildo Islands, in North Papua, Indonesia. We started the study by using the descriptive analysis towards Village Building Index indicators and drew on varied data sources. The result of analysis denotes that the outer islands is of great concern to be managed and the marginalized development there leads to the emergence of ideological, structural, organizational inequality driven by poor infrastructure and geographical conditions. We conclude that development equity has not happened yet in East Indonesia and still becomes a continuous work for the Indonesian government and stakeholders.

Keywords: *Village Building Index, development and adaptation strategy, outermost small island community, development equity, East Indonesia*

DDC: 307.2

Inayah Hidayati, Ade Latifa, Bayu Setiawan, dan Meirina Ayumi Malamassam

DECISION OF MIGRATION OF YOUNG WORKFORCE TO SORONG CITY, WEST PAPUA

ABSTRACT

This study aims to explain the decision-making process of migration of young workforce to Sorong City. This research will discuss the decision-making process to understand various factors that influence migrants, especially those who are highly educated, migrate to Sorong city, West Papua Province. These highly educated migrants might have various considerations when choosing Sorong City as their migration destination. The data collected is qualitative data from interviews and is supported by a literature review. Guidelines are prepared to facilitate interviews and produce a better understanding of migration behaviour. The results show that the importance of understanding migration is not just a linear process for the sake of the economy, but non-economic factors also influence migration decision making.

Keywords: internal migration, young workforce migrant, decision-making process

DDC: 307.2

Hatib Abdul Kadir

MIGRANTS AS A PROMINENT ASPECT THREATENING LOCAL PAPUANS

ABSTRACT

This research explores the internal migration of Indonesian people to Papua. Internal migration is considered in two types. First, migration which is initiated by the government through transmigration. Second, voluntary migration in which migrants have their own desire to migrate. The implication of massive and continued migration is a significant demographic change in Papua. Local people in Papua become minorities in terms of numbers and economic accesses. This research was conducted in Sorong Raya encompassing Sorong City and Sorong District. These two regions significantly denotes the dominance of economic migration which marginalizes local Papuans. This research also observed local people in Papua's responses towards migrants domination.

Keyword: migration, domination, threat, local Papuans

DDC: 323.1

Ode Jamal dan Yan Dirk Wabiser

CONTROVERSY ON REALIZATION OF LEGISLATIVE MEMBER AFFIRMATION SEATS IN SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA IN 2009 AND 2014 ELECTIONS

ABSTRACT

The enactment of an affirmation article in the Papuan Special Autonomy Law (UU Otsus Papua) is a long struggle that is motivated by the lack of political representation for the interest of indigenous Papuans or so-called Orang Asli Papua (OAP). This situation also received attention from the Drafting Assistance Team of UU Otsus Papua. They raised an idea to reserve the affirmative quota in which $\frac{1}{4}$ (one fourth) of the members of the Papuan People's Representative Council (DPRP) is for indigenous Papuans. During implementation, the additional quota of DPRP members becomes a controversy for the government, communities, and political elites. This article aims 1) to understand the backgrounds of $\frac{1}{4}$ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans, and; 2) to find out the dynamics of the controversy over the issue of $\frac{1}{4}$ (one fourth) additional affirmative quota of DPRP members for indigenous Papuans in the 2009 and 2014 General Elections. The research methods consist of a qualitative approach and a case study. Primary data used in this research were derived from in-depth interviews. On the other hand, secondary data was obtained from a review of literature and documents. The results are: 1) the underlying reason for this additional quota for DPRP members is a part of an affirmative policy to increase the indigenous Papuans' political participation. This affirmative policy is expected to resolve the gaps in the political recruitment of indigenous Papuans, particularly under the New Order regime dan; 2) the different interpretations of the Papua Special Autonomy Law's contents, especially regarding the affirmative seat quota for central and local government, political elites, and community, are the main factor that leads this affirmative seat quota difficult to be implemented.

Keywords: special autonomy, affirmation, legislative

DDC: 302.2

Fitria Widiyani Roosinda dan Ariyan Alfraita

**STATE OFFICIALS' STATEMENTS N ONLINE MEDIA REGARDING
THE CRISIS OF PAPUA: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS**

ABSTRACT

Recently, Indonesia has been threatened by the disintegration issue in Papua which initially began because of the incident happened in the Papuan students' dormitory in Surabaya and the clash between Papuan students and citizens in Malang. This situation led to the high-tense chaos that occurred in big cities in Papua and gained multifaceted perspectives and responses from many actors, particularly the government. This research analyzes the statements delivered by the state officials on online media in terms of the crisis in Papua. Utilizing critical discourse analysis, Van Dijk divides discourse analysis into 3 dimensions. First, textual dimension; second, social cognitive dimension, and; third, contextual or social practice dimension. The result is that the online media in Indonesia merely have differences in the schematic level which is the emphasis of important points in news' contents.

Keywords: crisis of Papua, online media, state officials

DDC: 398.2

Adolof Ronsumbre dan Marlon Arthur Huwae

**MYTHING THE MYTHS: LEGALITY OF CUSTOMARY LAND OWNERSHIP
CONCEPT IN MANOKWARI DISTRICT, WEST PAPUA PROVINCE**

ABSTRACT

Mutual claims in land ownership by several tribes are a continuing phenomenon happening in Manokwari Regency, West Papua Province. From 2013 to 2019, for instance, there were 32 actions undertaken to block public facilities owned by local government and private companies which have been built on the land belong to certain tribes or clans. Each tribe or clan claims as to the legal owners of the land. The legality of land ownership done by several clans or tribes is undergone by constructing a myth. This paper is based on the data that shows the mutual claim phenomena of three tribes on land rights in the area of Rendani Manokwari Airport. These three tribes are Arfak, Doreri, and Mansim Mansim Borai. Each tribe generates its own myth to reinforce land ownership claims. However, when there is no agreement, a new myth is raised to obtain compensation for land use. The myth is that the rights of customary land used for the operation of the Rendani Manokwari Airport does not belong to one tribe, but those of Arfak, Doreri, and Mansim Borai. It means that the myths that have existed are resurrected to produce new myths. The myths are produced to add facts regarding the legality of land ownership for some clans and tribes.

Keywords: land ownership claims, myths, the legality of land ownership, Manokwari's customary land

Bondan Widyatmoko

DISSERTATION SUMMARY

**THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
CERTIFICATION (ISPO): OPPORTUNITY FOR INCLUSION OF PALM OIL
SMALLHOLDER IN RIAU PROVINCE**

ABSTRACT

This dissertation examines the opportunities for oil palm farmers to be included in the palm oil production chain which is created through the implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil Certification (ISPO). This research shows that the implementation of ISPO certification can encourage the formalization of palm oil smallholders through the enclave process. In addition, ISPO also encourages efforts to prevent conflicts through arrangement and land use based on the legal evidence of ownership or land certificate (SHM) and Cultivation Registration Receipt (STDB). This encourages the inclusion of palm oil smallholders with the increasing open access to capital and information and the establishment of a traceability system for palm oil production in Indonesia. This dissertation research is a qualitative study using farmer household surveys, interviews, participant observations, and literature studies as data collection methods.

Keyword: implementation, palm oil, sustainable, palm oil smallholder

Ayu Nova Lissandhi

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Judul Buku: *Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place*.

Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

Eristya P. Irwanto

TINJAUAN BUKU

**DINAMIKA EKONOMI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PERTANIAN
DAN PANGAN**

Judul Buku: *The Political Economy of Agricultural and Food Policies*.

Penulis: Johan Swinnen (2018). Penerbit: Palgrave Macmillan, New York, USA, 264 hlm.

TINJAUAN BUKU

MEMAHAMI ETNOGRAFI RUANG DAN TEMPAT

Ayu Nova Lissandhi

Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: ayu.nls2@gmail.com

Judul Buku: *Spatializing Culture Studies: The Ethnography of Space and Place*.

Penulis: Setha Low (2017). Penerbit: Routledge, New York, USA, Hlm. xviii +263.

PENGANTAR

Pendekatan Etnografi Ruang dan Tempat: Suatu Pengantar

Pada metode penelitian sosial kita cenderung meletakkan lokasi dalam suatu metode penelitian hanya sebagai tempat pengambilan data, meski belakangan disadari bahwa lokus juga memiliki peran lebih ketika konsep ruang melekat pada suatu tempat. Penggunaan konsep ruang menjadi relevan untuk membantu menjelaskan mengapa tantangan yang dihadapi manusia di masa depan yakni isu globalisasi dan efek dari kebencanaan sampai dengan perubahan suatu masyarakat bisa direspon berbeda oleh suatu masyarakat yang hidup di lokasi yang berbeda. Padahal situasi yang berkembang saat ini (perubahan iklim, terorisme, pengungsi, dsb) memaksa studi lain juga mengembangkan keterikatan disiplin ilmu dengan konsep ruang terutama menyangkut bidang studi: lingkungan, geografi, perkotaan, kawasan, globalisasi, migrasi, desain dan bangunan, hingga kesehatan.

Berangkat dari minimnya literatur mengenai relasi etnografi dan konsep ruang dan tempat, Setha Low mengkomunikasikan proyek penulisan ini dalam bentuk buku yang terbit di tahun 2017 yang berisikan metode kerja lapangan, bentuk bukti dan pembangunan teori untuk studi ruang dan tempat.

Buku tersebut menyajikan pengembangan diskusi Antropologi Ruang yang secara sederhana dijabarkan dalam konsep-konsep sebagai berikut:

1. Hubungan tubuh dalam ruang (ruang yang diwujudkan),

2. Hubungan kekuatan global/lokal yang tertanam dalam ruang (ruang transnasional/translokal),
3. Peran bahasa dan wacana dalam transformasi ruang menjadi tempat (makna),
4. Pentingnya material dan metaforis arsitektur dan desain perkotaan (*built environment*).

Buku ini menawarkan gambaran utuh bagaimana menggunakan ruang untuk memahami proses relasi manusia dengan lingkungannya dalam memaknai keberadaannya dengan dunia yang dihadapi. Tujuan dari buku ini, oleh karena itu, adalah untuk menunjukkan bagaimana penelitian dan metodologi etnografi memberi dukungan dalam memahami ruang dan tempat dengan pendekatan yang unik dan berharga terutama menyangkut studi interdisipliner ini.

Memulai Studi Ruang

Setha Low memberikan gambaran tentang isi dari buku ini untuk memulai berdiskusi tentang ruang dengan dua pendekatan yang sudah mapan dan empat pendekatan baru dalam memahami suatu tempat. Ketika kita melihat suatu lansekap perkotaan yang tergambar dalam sebuah potret untuk memperoleh gambaran pendekatan yang akan digunakan, barangkali kita mulai mengategorikan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan seperti tampak pada Tabel 1.

Cara berpikir tentang ruang ini dimulai dan juga berpegang dengan dua pendekatan yang sudah mapan: produksi sosial ruang dan lingkungan buatan (*built environment*), dan konstruksi sosial ruang dan pembuatan tempat

Tabel 1. Hubungan Pertanyaan dengan Pendekatan Ruang

Pertanyaan	Pendekatan Ruang	Keterangan
1) Apakah kita tertarik sejarah suatu tempat? 2) Kapan dibangun ? 3) Bagaimana keadaannya? 4) Politik seperti apa yang melibatkan proses pembangunan? 5) Bagaimana skema pendanaan? 6) Dipelihara publik atau swasta?	Ruang sosial produksi	<i>Built environment</i>
1) mengapa begitu banyak orang berkumpul di beberapa lokasi daripada di tempat lain? 2) siapa orang-orang ini dan apa yang mereka lakukan dan pikirkan? 3) apa arti alun-alun kota ini bagi mereka yang menggunakannya dan bagi orang yang tinggal di dekatnya atau bahkan di pinggiran kota? 4) Apakah beberapa orang merasa nyaman di ruang sementara yang lain merasa dikesualikan?	Konstruksi sosial ruang	tentang kelompok orang, kegiatan sosial mereka dan makna
1) Apakah alun-alun ini terasa berbeda dengan penduduk lokal, turis, atau pemuda kulit berwarna? 2) Apakah apa yang orang katakan tentang alun-alun mengubah persepsi mereka tentang itu? 3) Bagaimana cara berkelok-kelok versus berjalan dengan sengaja dalam satu arah memengaruhi pengalaman tempat itu? 4) Bagaimana ruang fisik menjadi bagian dari dunia sosial dan, pada saat yang sama, bagaimana sosialitasnya menjadi material?	Ruang dalam sirkuit: afektif, diskursif, perwujudan dan translokal	Kompleksitas ruang

(*place making*). Perbedaannya di antara keduanya bahwa produksi sosial menekankan material dan dimulai dari kemunculan dan pembentukannya yang melibatkan sisi historis, politis, dan juga ekonomis, sedangkan konstruksi sosial yang tujuan akhirnya adalah makna yang melibatkan transformasi ruang dipahami melalui bahasa, interaksi sosial, ingatan, representasi, perilaku dan penggunaan ke dalam adegan dan tindakan.

Namun, buku ini menjawab ketiadaan pendekatan yang belum dijelaskan dan mengembangkannya dalam memahami ruang melalui perwujudan, diskursus, translokalitas, dan pengaruh. Spasialisasi budaya sebagai kerangka kerja konseptual menjadi tujuan dari disatukannya ide-ide tersebut dengan memaknai bahwa ruang dikonstruksi secara sosial dan diwujudkan secara materi. Manusia sebagai subyek baik individu maupun kelompok mengidentifikasi ruang dan

tempat melalui pengalaman dan persepsi sebagai hasil dari pergerakan analisa spasial yang memberi jangkauan hingga level global.

Meski belum terlalu dikenal sebagai bagian dari etnografi masa kini karena ruang dan tempat dianggap melibatkan entitas masyarakat yang terbatas, maka Setha Low memberi solusi dengan pernyataannya bahwa tempat dan ruang selalu diwujudkan dalam bentuk materialitas yang bersifat metaforis maupun diskursif. Selain itu, diskusi mengenai ini juga dianggap mengalami *gap* dalam memahami teori makro analisis spasial dengan data etnografi yang tebal dan rinci. Sehingga buku ini dibuat untuk memberikan inspirasi menjawab tantangan di atas serta memberi penjelasan mengenai artikulasi cara-cara di mana etnografer memasukkan budaya untuk mengungkap potensi teoretis dan metodologisnya.

Meruangkan Budaya (*Spatialized Culture*)

Ide pengembangan konsep etnografi ruang dan tempat dicapai dalam kerangka “Spasialisasi Budaya” yang mencakup pendekatan produksi sosial ruang, konstruksi sosial ruang, perwujudan-ruang, ruang-diskursif, ruang-emosif dan ruang-afektif, hingga ruang translokal. Setha Low memahami dua konsep ini sebagai gabungan dari dua kata:

1. “Spasial” : sebuah proses untuk menghasilkan dan menemukan - secara fisik, historis, efektif dan diskursif - hubungan sosial, institusi, representasi, dan praktik ruang.
2. “Budaya”: bentuk-bentuk pengetahuan, kekuatan dan simbolisme, interaksi manusia dan bukan manusia; proses material dan teknologi; dan proses kognitif (pikiran, kepercayaan, imajinasi dan persepsi).

Spasialisasi budaya dapat menjadi sarana keterlibatan publik karena memberi kesempatan orang-orang dan komunitas melakukan analisis spasial untuk memahami tempat sehari-hari di mana mereka tinggal, bekerja, berbelanja, dan bersosialisasi. Spasialisasi budaya tidak hanya bergerak dalam lingkup akademis namun juga dalam tataran praktis dalam kaitannya dengan proses dialogis yang menghubungkan produksi sosial ruang, lingkungan, dan pembangunan sosial dalam membangun di suatu lingkungan.

Studi ini juga berkembang ketika perspektif global dan lokal melibatkan sejumlah aliran ide, manusia, barang dan jasa dalam sebuah sirkuit waktu dan bahkan berimplikasi pada zona ekonomi. Belum lagi keterlibatan teknologi yang menyertai jaringan transnasional membentuk konteks bagaimana materialitas diwujudkan dalam spasialisasi budaya untuk mengantisipasi masa depan.

Meninjau Konsep-Konsep Ruang

Proyek penulisan tentang konsep ruang ini dimulai dengan mempelajari gagasan ruang yang terlebih dahulu ada mulai dari Michel Foucault, Michel de Certeau, hingga Henri Lefebvre.

Bagi para pendukung Marxis, mereka akan cenderung memulai materialis dan historis sebagai pintu masuk analisis mereka. Perspektif produksi

sosial menekankan pencarian data mengenai tentang bagaimana dan mengapa mereka muncul, siapa (pemerintah atau orang) atau apa (gempa bumi atau penggerak tanah) yang terlibat dalam kemunculan mereka dan kapan dan dimana terjadi, tentang bagaimana ruang dan tempat dipahami, dibangun dan dibuat. Materialitas adalah inti yang kemudian membentuk proses konstruksi sosial melalui dinamika kekuatan khusus, praktik hegemonik, strategi ekonomi, bahkan kontrol politik dan militer. Pendekatan produksi sosial terkadang melibatkan pemahaman konstruktivis sosial karena lingkungan material diberi makna melalui proses representasional dan simbolik. Turunan dari dua pendekatan ini meski menarik masih dianggap kurang mapan seperti yang didasarkan pada ruang dan pembuatan tempat, bahasa dan analisis diskursif ruang dan tempat, aspek emosional dan afektif ruang dan lingkungan dan dampak waktu/kompresi ruang pada tempat transnasional dan translokal. Oleh karena itu, tambahan dimensi pengalaman, sosial, dan material memiliki kontribusi dalam menjadi bagian dari metodologi etnografi ruang dan tempat.

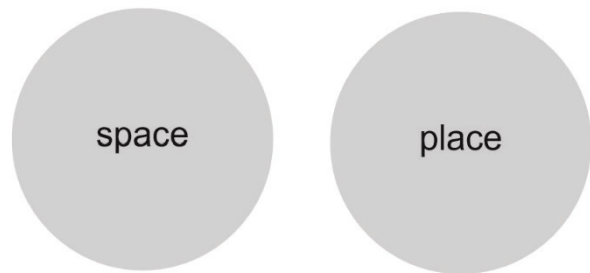
Genealogi Konsep Ruang dan Tempat

Pondasi awal dari membaca buku ini adalah memahami bahwa adanya ketidaksepakatan tentang hubungan konseptual antara ruang dan tempat dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita dituntun untuk memahami genealogi konsep ruang dan tempat untuk mengidentifikasi definisi dan hubungan ruang/tempat yang digunakan dalam buku ini. Untuk itu, serangkaian lima diagram Venn yang dibuat secara jelas menerangkan tentang bagaimana kita memposisikan suatu fenomena dalam konsep ruang: menggambarkan hubungan konseptual ini.

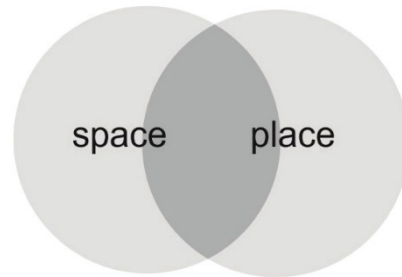
Gambaran hubungan konseptual antara ruang dan tempat sebagaimana digambarkan diatas menjadi panduan untuk membaca posisi ruang dan tempat dalam suatu studi kasus. Argumen dan kerangka referensi yang disusun diwujudkan dalam bentuk visual untuk memudahkan orientasi teoritis yang hendak disasar. Bagi Setha Low yang mengambil inspirasi dari pemikiran Cresswell (2015) dan Silverman (2014), ruang

Tabel 2. Hubungan Ruang dan Tempat

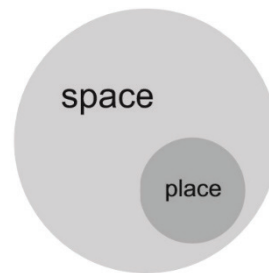
Gambar A (Pemisahan ruang dan tempat) terdiri dari dua lingkaran terpisah, konstruksi ruang dan tempat. Secara konseptual, mereka berdua bisa eksis secara independen atau hanya satu yang mengesampingkan yang lain.



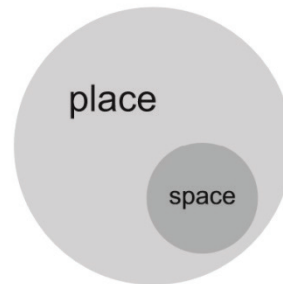
Gambar B (Tumpang tindih ruang dan tempat), ruang dan tempat membangun tumpang tindih, menciptakan area ketiga ruang / tempat yang memiliki potensi menyatukan aspek-aspek dari kedua konstruksi ke dalam sintesis baru.



Gambar C (Tempat terkandung di dalam ruangan) mewakili ruang sebagai konstruksi dominan dengan tempat konsep yang berada di dalam ruang, subkategori atau jenis ruang khusus.



Gambar D (Ruang yang terkandung di dalam tempat) membalikkan ruang dan tempat, menunjukkan tempat itu signifikan secara ontologis dan ruang himpunan bagian, atau, seperti yang saya ganti, tempat yang dilucuti makna



Gambar E (*Space and place coterminous*) hanyalah satu lingkaran berjudul *space / place*, menunjukkan bahwa kedua konstruksi ini sepenuhnya tumpang tindih - yaitu, secara konsep berlebihan seperti yang diasumsikan dalam percakapan dan tulisan sehari-hari.



dianggap sebagai konstruksi yang lebih umum dan abstrak yang mempertahankan produksi sosial dan asal-usul materialisnya. Perbedaan di antara keduanya bahwa ruang, terutama sosial, diproduksi oleh tubuh dan kelompok orang, serta kekuatan sejarah dan politik, sedangkan tempat digunakan dalam arti ruang yang dihuni dan disesuaikan pemaknaan pribadi dan kelompok melalui perasaan, persepsi dan pemahaman indrawi.

Ruang bersifat subyektif karena pemaknaan diperoleh melalui pengalaman individu dan juga kolektif yang dipelajari sehingga tercipta konsep spasialisasi budaya. Buku ini menerjemahkan pemahaman tentang ruang dan tempat melalui sejumlah karya etnografi. Sisanya, buku ini menjelaskan enam kerangka konseptual yang dibahas dalam pendahuluan - produksi sosial, konstruksi sosial, bahasa dan diskursus, emosi dan pengaruh, ruang yang diwujudkan dan translokal.

Pembahasan Kerangka Konseptual Ruang:

1. Produksi sosial ruang (*The social production of space*)

Kerangka konseptual dari produksi sosial ruang yang berfokus pada kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang menghasilkan ruang dan sebaliknya, dampak ruang yang diproduksi secara sosial pada aksi sosial. Hal-hal yang dicari dalam bahasan ini antara lain: sejarah sosial dan pengembangan *built environment*; ekonomi politik ruang; produksi sosial, reproduksi dan perlawanan; kontrol sosial dan pemerintahan. Masing-masing pilihan memiliki implikasi metodologis, untuk mencapai tujuan tentang bagaimana kekuatan sejarah, politik, dan ekonomi membentuk lingkungan material.

Contoh etnografi yang diceritakan oleh Setha Low dalam bahasan buku ini misalnya Parque Central, yaitu bagaimana elit lokal dan transnasional - terlibat dalam proses produksi lingkungan material yang membatasi sumber daya dan akses ke barang publik bagi mayoritas penduduk miskin dan kelas pekerja. Selain itu, produksi sosial juga menawarkan cara untuk memahami mengapa suatu tempat berada di lokasi tertentu, bagaimana

dia berkembang menjadi bentuknya sekarang dan bagaimana dia mempertahankan dan mengakomodasi kekuatan dan hubungan sosial yang tidak setara yang ditemukan antara pedagang dan polisi di Pasar Malam Shilin.

2. Konstruksi sosial ruang (*The social construction of space*)

Inti dari konstruksi sosial ruang adalah pemaknaan yang mencakup transformasi bahkan kontestasi interaksi sosial, ingatan, perasaan, imajinasi, dan pengalaman sehari-hari. Tantangan pendekatan ini adalah perbedaan makna, pengalaman pengetahuan lokal sehingga akumulasi secara kolektif mengenai pemahaman tempat, hubungan spasial dan representasi memiliki lapisan yang beragam. Asumsi tentang konstruksi sosial ruang secara hati-hati perlu dilakukan klarifikasi sehingga didapatkan analisis spasial yang mampu memperlihatkan hubungan kekuasaan yang tertanam dalam ras, kelas dan ketidaksetaraan jender; klaim sengketa sejarah, warisan dan memori kolektif; akses terbatas ke wilayah dan sumber daya; dan proses sosial lainnya yang diperebutkan untuk menghindari prasangka.

Mengambil contoh etnografi Sawalha dari kasus Beirut meski bukan kisah keberhasilan masyarakat setempat dalam menghadapi konstruksi negara yang dominan di kota sebagai “modern dan internasional,” ruang dan tempat konstruksi sosial berperan menentukan lansekap perkotaan masa depan. Interaksi yang kompleks dengan berbagai kelompok memobilisasi wacana perkotaan yang berbeda dari masa lalu dalam upaya untuk melawan transformasi lansekap perkotaan.

3. Perwujudan ruang (*Embodied space*)

Kerangka konseptual dari “ruang yang diwujudkan” mendiskusikan dua level analisis yaitu tubuh individu (mikro) dan pembuatan tempat kekuatan sosial, ekonomi dan politik (makro). Analisis spasial sering mengabaikan tubuh, padahal tubuh memiliki potensi sebagai entitas fisik dan biologis, sebagai pengalaman hidup dan sebagai pusat agensi - lokasi untuk berbicara dan bertindak di dunia. Hubungan di antara keduanya terletak pada bagaimana pengalaman

persepsi manusia dan keterlibatannya dalam mengambil materi dan terwujud suatu bentuk spasial. Kesulitan dalam mengidentifikasi yang melekat pada konsep ini, diskusi ini mengambil sejumlah inspirasi dari sejumlah tokoh dengan memfokuskan pada pengembangan konsep: proxemics, fenomenologi, sensorium, spasial dan orientasi, gerakan, moilitas dan sirkulasi

Menghadirkan tiga contoh etnografi tentang bagaimana ruang yang diwujudkan secara sosial, ritual dan politik diciptakan dan hidup melalui *coro* di Serbia, *retret* dan *paseo* di Kosta Rika dan gerakan sepeda Massa Kritis di Budapest, pada diskusi ini, ruang yang diwujudkan ditempatkan sebagai model heuristik untuk memahami penciptaan ruang dan tempat melalui lintasan, gerakan dan tindakan. Diskusi ini menjadi salah satu strategi untuk mengintegrasikan kerangka konseptual produksi sosial dan konstruksi sosial dengan menempatkan materialitas tubuh dan pengetahuan dan kognisi tubuh yang juga perlu dianggap penting untuk memahami ruang dan tempat dari sudut pandang etnografi.

4. Diskursus Bahasa dan ruang (Language discourse and space)

Kerangka konseptual ini meneliti cara-cara di mana bahasa dan diskursus membentuk ruang dan tempat dengan menempatkan analisis spasial yang kuat dalam interaksi sosial, strategi komunikasi, dan praktik linguistik. Pendekatan ini menyediakan secara eksplisit metodologis untuk memahami bagaimana komunikasi sehari-hari menghasilkan, memanipulasi, dan mengendalikan makna spasial. Pentingnya mempertimbangkan efek material dari bahasa, aspek performatif dan diskursifnya dan kemampuannya sebagai penanda identitas berkontribusi dalam menghasilkan ruang dan memahami orang-orang dan interaksinya.

Bahasa didefinisikan sebagai kosakata (kata-kata) yang membentuk diskursus, sementara diskursus menghubungkan bahasa dan struktur dan agensi. Hal-hal yang dilihat mengulas hubungan tersebut misalnya penamaan tempat yang menggunakan pendekatan tekstual ke *built environment*. Kekuatan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengungkap makna dan kekuatan dengan mudah dalam apa yang

diucapkan seperti dalam apa yang tidak dikatakan. Sedangkan kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa pemaknaan makna dan politik ruang diskursif adalah modalitas linguistik dan kognitif yang bisa sulit untuk diintegrasikan dengan analisis ruang dan tempat lainnya.

5. Emosi, pengaruh, dan ruang (*Emotion, affect and space*)

Setha Low memberi gambaran bagaimana studi emosi memiliki pengaruh terhadap etnografi ruang dan tempat. Emosi dibangun secara sosial dan salah satu proses pembuatan makna dengan memungkinkan perasaan mempengaruhi orang lain dan lingkungannya. Emosi bagi ahli etnografi sering digunakan untuk memahami teori dan metodologi konstruksi sosial mengenai bagaimana emosi bekerja dalam lingkungan budaya dan sosial yang berbeda. Salah satu kekuatan dari metodologi emosi, pengaruh, dan ruang, yaitu memungkinkan etnografer untuk menggali lebih dalam berbagai jenis data dan interaksi sosial. Seringkali dampak reaksi emosional terhadap ruang mempersulit makna informan mengenai ruang atau apa yang dilakukan orang tersebut di dalam ruang.

6. Ruang translokal (*Translocal space*)

Gagasan ini mendukung anggapan bahwa ruang translokal adalah konfigurasi spasial baru yang memiliki konsekuensi pengalaman, sosial dan material dalam kehidupan global dan lokal masyarakat. Diskusi translokal secara sederhana disampaikan oleh Setha Low mengenai survivalitas migran di suatu wilayah dengan membentuk ruang yang tidak cukup jika hanya mengandalkan konsep globalisasi dan glocalisasi. Tetapi ruang translokal juga menawarkan, seperti yang dikemukakan Brun (2001) dalam diskusinya tentang perpindahan, momen agensi dan berada di kedua dunia dan karena itu ditempatkan, diwujudkan dan diamankan untuk sementara waktu. Dalam dunia kita yang semakin mengglobal dan terfragmentasi, ruang-ruang translokal ini memiliki peran penting untuk dimainkan, bukan untuk menyembunyikan kesulitan dan ketidakadilan migrasi transnasional, tetapi untuk membayangkan masa depan.

Konsep translokalitas melepaskan pengalaman lokalitas dan menjadi bagian dari berada di lingkungan atau tanah air tertentu dan sebaliknya menempatkannya dalam badan bergerak dan banyaknya ruang kehidupan imigran. Akhirnya, ruang translokal membuka kemungkinan beragam jenis formasi sosial, spasial, dan politik melalui rasa makna, loyalitas, dan kepentingan bersama yang mengikat orang dan tempat bersama.

PENUTUP

Tujuan buku ini adalah untuk memajukan studi ruang dan tempat dengan mengeksplorasi dan menjelaskan dua kerangka konseptual yang mapan - produksi sosial dan konstruksi sosial - dan empat yang lebih baru - mewujudkan ruang, bahasa dan wacana, emosi dan pengaruh serta ruang translokal. Bagaimana kerangka konseptual ini bekerja secara etnografis dan dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan lain adalah untuk mempertimbangkan tumpang tindih konstruksi sosial dan produksi sosial ruang dan titik-titik persimpangan mereka dalam mencari konsep-konsep baru dan model heuristik yang mungkin mengintegrasikan mereka. Kesimpulan ini menekankan bagaimana berbagai pendekatan digunakan secara etnografis.

Berdasarkan temuan-temuan ini dan pengalaman etnografi Setha Low, kita diingatkan pentingnya ruang-ruang ini menjadi, tidak hanya untuk identitas budaya dan sosialitas, tetapi juga untuk hubungan ekonomi dan politik dan pengembangan jenis solidaritas baru. Setha Low memperlihatkan ruang dan tempat seperti biasa sedang dibangun, diproduksi oleh interaksi global ke lokal, dan dibentuk oleh banyak badan, kolektivitas, dan lintasan.

PUSTAKA ACUAN

- Brun, Catherine. (2001). "Reterritorializing the Relationship Between People and Place in Refugee Studies." *Geografiska Annaler* 83 B, no. 1: 15–25.
- Cresswell, Tim. (2015). *Place: An Introduction*. Malden, MA and Oxford: Wiley-Blackwell
- Low, Setha dan Denise Lawrence-Zuñiga. (2003). *The Anthropology of Space and Place: Locating Culture*. Oxford and New York: Blackwell.
- Low, Setha, Dana Taplin dan Suzanne Scheld. (2005). *Rethinking Urban Parks: Public Space and Cultural Diversity*. Austin: University of Texas.
- Low, Setha. (2017). *Spatializing Culture: The Ethnography of Space and Place*. New York: Routledge.
- Sen, Arijit dan Lisa Silverman (eds). (2014). *Making Place: Space and Embodiment in the City*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

<http://jmi.ipsk.lipi.go.id>

